

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA), LUAS WILAYAH DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

**Peminatan:
Akuntansi Sektor Publik**



Disusun oleh:
ANNISA WAHYU HIKMAH
NIM.1522100907

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
AGUSTUS 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA), LUAS WILAYAH DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah)**

Diajukan oleh:

ANNISA WAHYU HIKMAH
NIM. 1522100907

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Dharma

Pada tanggal

Pembimbing I


Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0018107901

Pembimbing II


Susyanti, S.E., M.Si.
NIDN. 0610048105

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi


Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA), LUAS WILAYAH DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah)**

Diajukan oleh:

ANNISA WAHYU HIKMAH

NIM.1522100907

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharmadan diterima
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Pada tanggal

Ketua

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc
NIDN. 0207055601

Sekretaris

Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

Penguji I

Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0018107901

Penguji II

Susyanti, S.E., M.Si.
NIDN. 0610048105



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.
NIDN. 0207055601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Annisa Wahyu Hikmah

NIM : 1522100907

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah skripsi dengan judul: "**Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah)**" adalah benar-benar karya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penelitian ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana perlunya.

Klaten, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Annisa Wahyu Hikmah

MOTTO

“Filosofi padi, "semakin berisi maka padi akan semakin merunduk", maknanya

"semakin kita merasa bisa maka kita harus bisa semakin merasa”

— Tere Liye, Puka

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing

is not to stop questioning”

— Albert Einstein

“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi

mudah ketika aku menginginkannya.”

— Annie Gottlier

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya terkasih. Bapak Sumpono dan Ibu Kasini, yang senantiasa mendoakan, memberikan ridho, nasihat, bimbingan, motivasi, dan yang selalu memberikan kasih sayang serta menguatkan saya, terimakasih atas semuanya.
2. Adik, kakak, dan keponakan saya tercinta. Denoni Wahyu R, Singgih Putra A, dan Indah Utami P yang selalu menjadi penyemangat saya.
3. Rakka Aditya C. W. P, terimakasih atas dukungan, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan ketika saya butuh semangat, yang selalu ada dan memberikan waktu untuk berbagi dan memberikan saran.
4. Sahabat baikku. Dwi Hastusti, Dyah Untari, Sc. Devi, Anita P, Bayu, dan Hanafi terimakasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, tempat berbagi di kala senang maupun susah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari.
5. Teman dan saudara seperjuangan, Akuntansi 2015 terimakasih atas kerja sama dan semua kenangan yang telah kita ukir bersama di kampus tercinta Universitas Widya Dharma Klaten. Semoga pertemanan dan kekeluargaan ini akan tetap terjalin selamanya.
6. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala ridha dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “ Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017)” dengan lancar.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagian persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa semester akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik segi teknis maupun segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar menjadi lebih baik.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M. Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.

2. Bapak Drs. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Agung Nungroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Bapak Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak/ Ibu dosen Universitas Widya Dharma Klaten Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
7. Kedua orang tua Bapak Sumpono dan Ibu Kasini yang telah memberikan doa, perhatian, semangat dan dukungan baik secara moral maupun material yang tak ternilai.
8. Kakak, adik, dan keponakan saya tercinta Denoni Wahyu R, Singgih Putra A, dan Indah Utami P yang selalu menjadi penyemangat saya.
9. Untuk sahabat dan temanku Dwi Hastusti, Dyah Untari, Sc. Devi, Lisa, Anita P, Bayu, dan Hanafi yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Teman-teman Mahasiswa Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi.

11. Teman-teman KKN tahun 2018 kelompok 14 khususnya Desa Gergunung, terimakasih untuk kebersamaan satu bulannya.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan maupun motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Semoga semua bantuan, doa, dukungan, semangat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Wassalamu' alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Klaten, Agustus 2019

Penulis

Annisa Wahyu Hikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	8
B. Model Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data.....	18
B. Populasi dan Sampel.....	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	19
E. Metode Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	29
B. Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	31
C. Pengujian Asumsi Klasik.....	33
1. Uji Normalitas.....	34
2. Uji Multikolinieritas	35
3. Uji Heteroskedastisitas	36
D. Uji Hipotesis.....	37
1. Uji Regresi Berganda	37
2. Uji t (Parsial)	40
3. Uji Simultan (Uji F)	41
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	41
E. Pembahasan.....	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	17
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penentuan Sampel.....	29
Tabel 4.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	31
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	34
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas.....	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda	38
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji t.....	40
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji F.....	41
Tabel 4.10 Hasil Pengujian R Square.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ringkasan Data Variabel
Lampiran 2	Uji Analisis Statistik Deskriptif
Lampiran 3	Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 4	Uji Hipotesis
Lampiran 5	Ringkasan Data Luas Wilayah
Lampiran 6	Surat Keterangan Dari BPK Jateng

ABSTRAK

Annisa Wahyu Hikmah, NIM. 1522100907, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (2) pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) pengaruh Pendapatan asli Daerah terhadap Belanja Modal, (4) pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal, (5) pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal, (6) pengaruh Kinerja keuangan terhadap Belanja Modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh 31 Kabupaten/ Kota yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, uji determinasi dan uji hipotesis menggunakan metode Regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas wilayah, dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

Annisa Wahyu Hikmah, NIM. 1522100907, Accounting Study Program, Faculty of Economics, Widya Dharma University, Klaten, Thesis Title: "**Effect of Special Allocation Funds (DAK), General Allocation Funds (DAU), Regional Original Revenue (PAD), Remaining Budget Financing (SiLPA), Area and Performance Finance on Capital Expenditures (Study in District / City Government in Central Java) "**".

The purpose of this study is to examine (1) the effect of the Special Allocation Fund on Capital Expenditures, (2) the effect of the General Allocation Funds on Capital Expenditures, (3) the effect of Regional Original Revenues on Capital Expenditures, (4) the influence of the Excess of Funding Budget Financing on Capital Expenditures , (5) the effect of Area Size on Capital Expenditures, (6) the effect of Financial Performance on Capital Expenditures.

The population in this study is the Regency / City in Central Java Province. Sample selection using purposive sampling technique, obtained 31 districts / cities that meet the sample criteria in this study. The analytical methods used include descriptive statistical tests, classic assumption tests include normality tests, multicollinearity tests and heteroscedasticity tests, determination tests and hypothesis tests using the Regression method.

The results of this study show the Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Remaining Budget Financing, Area Size, and Financial Performance have no effect on Capital Expenditure, but Regional Original Revenue influences Capital Expenditures.

Keywords : Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), Regional Original Revenue (PAD), Remaining Budget Financing (SiLPA), Area, Financial Performance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja Langsung Pemerintah Daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal. Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin,

gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap yang dalam pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai

Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, Peraturan Daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Hadi, 2007).

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pengeluaran kepentingan

daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut dengan Belanja Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah Afifah (2010). Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Operasi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah cenderung konsumtif dan tingkat produktifitas Pemerintah Daerah rendah. Di lain pihak masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan presentase Belanja Modal yang semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 4) Dana Bagi Hasil.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat

digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yakin bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik dengan mengambil judul: **"Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?

5. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
6. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
5. Untuk menguji pengaruh luas wilayah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan terhadap terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian anggaran Belanja Modal.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengalokasikan Belanja Modal dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam pembelanjaan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan cara memberikan proporsi Belanja Modal yang cukup besar untuk pembangunan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat diartikan bahwa alokasi belanja modal dalam pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat. Dana alokasi umum yang selama ini diterima oleh daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modalnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa selama ini dana alokasi umum banyak digunakan untuk memenuhi belanja operasional dari pemerintah daerah,

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan aset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti. Hal tersebut disebabkan alokasi DAK tiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi anggaran belanja modal cenderung sedikit.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk belanja pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
5. Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat

untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

6. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini terjadi dikarenakan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya mengalokasikan pendapatan daerah yang berasal dari PAD untuk membiayai belanja modal daerah, dan juga karena tingkat ketergantungan daerah yang masih tinggi sehingga belanja modal daerah hanya dibiayai dari dana perimbangan yang diterima dari pihak ketiga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti mencobamemberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah Daerah harus benar – benar mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga dengan kemandirian daerah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah sendiri demi kepentingan masyarakat melalui pembangunan pelayanan publik. Adanya peningkatan penerimaan PAD tersebut di harapkan dapat meningkatkan porsi Belanja Modal yang di anggarkan. Hal ini cukup penting mengingat PAD merupakan indikator kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini mengingat masih 43% faktor lain di luar variabel penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, disarankan agar objek penelitian dilakukan di daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, S. dan Halim, A. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi*
- Aditiya, N. Y dan Dirgantari, N. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN*, 17 (1): 42-56.
- Adyatma, E. dan Oktaviani R.M. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 4 (2): 190-205.
- Afifah, N.N. 2010. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana. Jakarta.
- Akbar, T. 2012 .Pengaruh Pendapatan Asli dan Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Pasundan, Bandung.
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Darise, N. 2008 . *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

- Gerungan, H.P, Saerang,D.P dan Ilat, V. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ekonomi*. Hal 233-245.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2006. *Statistik Multivariate SPSS*. Penerbit BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, R. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekom*, 4(2): 4543-4557.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D dan P. Hadi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, Belanja Modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. *Jurnal dan Prosiding SNA*. Makassar
- Hoesada, J. 2016. *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Junaedy. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dana Bagi hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, terhadap Belanja modal. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.
- Kusnandar dan Siswanto. 2010. Pengaruh dana alokasi umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*. 9 (2):91-102.
- Moha, M. A., G. Kumenaung dan Debby Ch. R. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2004-2013. *Jurnal Ekonomi*.
- Novianto, R dan H. Rafiudin, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. 4 (1):1-20.
- Nugroho, B. A. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Pradita, R. R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Propinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya. 1 (2):1-20.
- Prastiwi, A., Nurlaela. S dan Chomsatu. Y. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*
- Praza, E. I. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 4 (1): 25-36
- Hidayat, A. 2017. *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. <https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>. Diakses tanggal 14 Juni 2019.
- Putro, N S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah).

Skripsi Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Sianipar, E. S. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi* Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan.

Situngkir, A. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran Belanja Modal pada pemko/pemkab sumatera utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.

Sulistiyowati, D. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro

Supomo, B dan N. Indriantoro. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 10 juli 2018